

PENGARUH NASIONALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN PG GONDANG WINANGUN TAHUN 1957-1964

Oleh: Yosef Denta Eka Pradana, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, lampionite@gmail.com

Abstrak

Proklamsi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Setelah Indonesia merdeka dan berakhirnya demokrasi parlementer hingga 1957 keamanan dalam negeri memburuk dan pergolakan politik telah mendorong inflasi. Salah satu penyebab keterpurukan ekonomi tersebut adalah adanya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember 1957 setelah kekalahan Indonesia di forum PBB pada 29 November 1957 dalam masalah Irian Barat. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang Belanda dinasionalisasi menjadi milik Indonesia, salah satunya adalah PG Gondang Winangun. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh nasionalisasi terhadap perkembangan PG Gondang Winangun tahun 1957-1964.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap ontentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan nasionalisasi telah memberikan dampak yang cukup besar bagi PG Gondang Winangun terutama dalam sistem manajemen, produksi, dan tenaga kerja. Kebijakan nasionalisasi berdampak pada berpindahnya sistem pengelolaan PG Gondang Winangun dari tangan Belanda kepada kaum pribumi. Lebih lanjut, produksi gula di PG Gondang Winangun pada masa-masa produksi juga menurun karena kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil. Penurunan produksi juga disebabkan karena berkurangnya jumlah tenaga kerja di masa nasionalisasi guna menekan biaya produksi pabrik.

Kata Kunci: *Nasionalisasi, Gula, Gondang Winangun*

THE INFLUENCE OF NATIONALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF GONDANG WINANGUN'S SUGAR FACTORY IN 1957-1964

Abstract

The declaration of Indonesia Independence day was read out by Soekarno-Hatta on August 17, 1945. It was the milestone of the birth of the independent Unitary State of the Republic of Indonesia. After the Indonesia's independence declaration, it was the simbol of the end of parliamentary democracy on 1957. In this year the domestic security become worst and the political upheaval had driven inflation. One of the causes of the economic downturn was the takeover of Dutch companies in December 1957. After the defeat on the issue if West Irian, Indonesia defeated at the United Nations forum on November 21, 195. All the dutch companies was nationalized to Indonesia. One of them is Gondang Winangun's sugar factory. The objective of this research is to determine the influence of nationalization on the development of PG Gondang Winangun in 1957-1964.

This research uses critical historical research methods which are consists of four items. First, heuristics, the stage of collecting data or relevant historical sources. Second, source criticism, the stage of assessment of the authenticity and credibility of sources obtained from the physical and the source content.

Third, the interpretation which is obtained by looking for the related relation between the facts that have been obtained to become more meaningful. Fourth, historiography or writing the delivery of synthesis in the form of historical work.

The results of this research are to indicate that the nationalization policy gave considerable impact for Gondang Winangun's sugar factory especially in the management, production process and labor system. The nationalization policy had an impact on the transfer of the Gondang Winangun's sugar factory management system from the Dutch to aboriginal. Furthermore, sugar production at Gondang Winangun's sugar factory declined due to the unstable domestic political conditions. The decline production based on the decrease in the number of workers in the nationalization period in order to reduce the cost of factory production.

Key words: *Nationalization, Sugar, Gondang Winangun*

A. Pendahuluan

Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan bebas dari ikatan penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dan berakhirnya demokrasi parlementer hingga 1957 keamanan dalam negeri memburuk dan pergolakan politik telah mendorong inflasi. Memburuknya keamanan itu disebabkan oleh dua hal penting. Pertama adalah gerakan kedaerahan menentang pemerintahan pusat yang mencapai puncaknya dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi dan Pemberontakan PRRI di Sumatera. Pemberontakan kedaerahan itu telah mengacaukan Rencana Lima Tahun. Kedua adalah adanya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada Desember 1957 setelah kekalahan Indonesia di forum PBB pada 29 November 1957 dalam masalah Irian Barat. Dampak dari kekalahan Indonesia dalam forum PBB tersebut telah mendorong peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dan spontan, yaitu banyak perusahaan Belanda yang diambil alih oleh serikat-serikat buruh yang sepenuhnya dikendalikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Djuanda dan Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat tidak mampu membendung aksi radikalisme anti Belanda yang dikobarkan oleh Soekarno¹.

Perubahan penting dan mendasar dalam bidang politik di Indonesia pada kurun waktu 1957 hingga 1960 ternyata telah mempengaruhi pola kebijakan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1957, dalam rangka konfrontasi dengan Belanda merebut kembali Irian Barat, semua perusahaan perkebunan milik Belanda beserta lembaga penelitiannya terjadi nasionalisasi sehingga diambil alih pemerintah RI.

Proses nasionalisasi dibidang perekonomian di Indonesia, ditandai dengan proses pemindahan atau pengambil alihan aset-aset pemilikan perusahaan perkebunan, pertambangan dan perusahaan lainnya yang dahulunya dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Salah satu perusahaan perkebunan yang terkena proses nasionalisasi adalah perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula terutama di wilayah Jawa. Di wilayah Klaten terdapat salah satu pabrik gula yang terkenal kebijakan nasionalisasi yaitu Pabrik Gula Gondang Winangun pada tahun 1957-1964.

B. Perkembangan PG Gondang Winangun Sebelum Nasionalisasi

PG Gondang Winangun merupakan salah satu di antara 180 pabrik gula lain di Pulau Jawa yang masih aktif. Namun sejak tahun 1968 PG Gondang Winangun telah berganti nama dengan PG Gondang Baru. . Pabrik ini didirikan tahun 1860 oleh NV Klatensche Cultuur Maatschapij yang berkedudukan di Amsterdam, Netherland. Pabrik Gondang Winangun ini dikelola oleh NV

¹ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), hlm. 77.

Mirandolle Vaut dan Co yang berkedudukan di Semarang.²

PG Gondang Winangun dipimpin oleh seorang Administratur. Administratur dalam menjalankan pabrik dibantu oleh staf pegawai yang terdiri dari orang-orang Belanda atau Indo-Belanda yang berjumlah antara 18 sampai 22 orang.³ Kelompok pegawai ini memiliki skill dan menduduki jabatan pimpinan di dalam pabrik. Adapun kelompok pegawai tersebut diantaranya, Kepala Bagian Tanaman, Kepala bagian Akuntansi, Kepala Bagian Instalasi dan Kepala Bagian Pengolahan.

Perkebunan tebu milik PG Gondang Winangun ini tersebar di beberapa wilayah yang ada di Klaten. Perkebunan tebu yang disewa oleh pabrik gula ini diantaranya terletak di daerah Djoton, Besar, Gathak, Wonobojo, Banjoeseng, Mipitan, Kadiladjo, Kergan, Gereh, Tambakkan, Ngorean, Soko, Teloek, Sawahan, Karangnongko, Karangtoeri, Kadilanggon, Karangasem, Wetan Patjing, Tegalsari, Djloembang, Kadibolo, Sragogede, Goemoelan, Ngemplak, Modjajan, dan Ngembel⁴.

Wilayah kerja PG Gondang Winangun mengalami perkembangan seiring dengan

permintaan dan penambahan kapasitas produksi yang merupakan imbas dari permintaan gula di pasar dunia. Perkembangan ini seiring dengan masa keemasan gula di Jawa yang terjadi antara tahun 1889 sampai dengan tahun 1929, yaitu sebelum krisis Malaise 1930 mencapai puncaknya.⁵

Tabel 01:

Total Luas Area PG Gondang Winangun Tahun 1930-1940:

Tahun	Luas Total (Hektar)
1930	1347.81
1931	1357.71
1932	1140.36
1933	1154.68
1934	1127.05
1935	-
1936	1068.40
1937	1243.50
1938	1174.33
1939	1295.24
1940	1164.17

Sumber: Arsip, *Jaarverslag Suiker Fabriek Gondang Winangoen, Deel II, Kalenderjaar 1931,*

² Novrasilofa S, "Museum Gula Gondang Baru di Klaten", *Makalah* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 5-6.

³ G.C. Allen dan A.G. Donnithorne, *Western Entepries in Indonesia and Malaya*, (London: George Allen & Unwin, 1957), hlm. 84.

⁴ *Jaarverslag Suiker Fabriek Gondang Winangoen 1932, Deel II Kalenderjaar 1932/1933.*

⁵ Rusdi Mustopo, "Pengaruh Krisis Malaise terhadap Pabrik Gula di Klaten sampai Tahun 1942", *skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 53-54.

1932, 1933, 1934, 1935, dan 1939.

Selama operasionalnya, pabrik ini tidak lepas dari kondisi pasang surut hal ini tentunya berpengaruh pada perubahan manajemen pabrik. Pada tahun 1930-1935 pabrik tidak berproduksi karena adanya krisis ekonomi. ⁶Setelah berakhirnya masa krisis, pabrik ini berpindah pengelolaan yang jatuh ke tangan warga Belanda bernama Beermers pada tahun 1935 hingga 1942. Tahun 1935-1942 pabrik beroperasi kembali dipimpin Boerman dan M.F Bremmers. Tahun 1942-1945 pabrik gula Gondang Winangoen dikuasai oleh Jepang yang dipimpin Nisiko dan Inogaki, tetapi pengelolanya dibantu oleh M.F Bremmers seorang dari Belanda. Barulah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pabrik ini diserahkan ke pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Ketika terjadi revolusi kemerdekaan tahun 1945, pabrik gula dikuasai bangsa Indonesia yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan dipimpin oleh Doekoet pada tahun 1945-1948. Sistem manajemen seperti ini terus berlangsung hingga 1957.

Perkebunan tebu di *Vorstenlanden*, salah satunya di PG Gondang Winangun tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh tanah dan tenaga kerja dari tahun ke tahun. PG Gondang Winangun memperoleh tenaga kerja

dari masyarakat di daerah *emplacement* pabrik gula. Buruh direkrut melalui bantuan para bekel yang bekerjasama dengan kepala desa, selain itu para petani marginal juga turut serta membantu perusahaan untuk merekrut buruh pabrik dan perkebunan Gondang Winangun.

Buruh PG gondang Winangun selain berasal dari desa-desa yang berada disekitar pabrik gula juga berasal dari luar wilayah Klaten. Buruh yang berasal dari luar wilayah Klaten merupakan buruh yang melakukan migrasi.⁷ Migrasi buruh ke wilayah Klaten digalakan karena di wilayah ini banyak berdiri pabrik gula lain selain PG Gondang Winangun. Berdasarkan data sensus penduduk di Jawa Tengah pada tahun 1930, selama periode antara tahun 1920 sampai 1930 jumlah penduduk yang bermigrasi ke Jawa Tengah sekitar 778.593 orang yang terdiri dari 377.720 laki-laki dan 400.873 wanita. Jumlah ini mencapai 7,1% dari total penduduk provinsi Jawa Tengah. Di Karisidenan Surakarta jumlah imigran sebesar 27.699 orang yang terdiri dari 12.412 laki-laki dan 15.287 wanita. Di daerah Klaten yang merupakan bagian dari wilayah Karisidenan Surakarta tercatat jumlah imigran yang tinggal di Klaten sebesar 5.237 orang yang terdiri dari 2.290 laki-laki dan 2.947 perempuan. Imigran ini 60% berasal dari wilayah mereka imigran berasal dari

⁶ *Jaarverslag Suiker Fabriek Gondang Winangoen, Deel II, 1934/1935.*

⁷ Everett S. Lee, *Teori Migrasi*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2000), hlm. 2.

kabupaten Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Ngawi dan Madiun.⁸

Pada awal pertumbuhan industri gula di Klaten, jumlah buruh yang dipekerjakan di pabrik gula Klaten sekitar 2800 orang buruh musiman dan 500 orang buruh tetap. Pada masa itu dua buah pabrik gula yang berjalan di Klaten yaitu PG Gondangwinangun dan PG Ceper mempekerjakan 600 orang buruh untuk pengolahan gula. Selain itu juga, masih terdapat buruh musiman yang tidak diketahui pasti seberapa besar jumlahnya. Pada periode sebelum krisis malaise antara tahun 1920-1929 jumlah buruh pabrik gula yang ada di Klaten sebanyak 57.000 orang. Pada tahun 1930, sembilan buah perkebunan tebu di daerah tersebut juga sudah mempekerjakan sebesar 39.230 orang buruh.

C. Nasionalisasi PG Gondang Winangun

Nasionalisasi PG Gondang Winangun yang berada di Klaten secara sah dilaksanakan setelah adanya PP tentang nasionalisasi pabrik gula. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambialih pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia yang pada waktu itu milik orang Belanda. PG Gondang Winangun adalah salah satu pabrik milik Belanda yang diambialih. PG Gondang Winangun termasuk **pabrik gula yang**

telah diambialih oleh pemerintah berdasarkan PP No. 1 tahun 1963. Pabrik-pabrik yang telah berada di bawah kekuasaan pemerintah dipimpin langsung oleh orang pribumi sendiri.

Nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda diikuti dengan pemulangan dan pengusiran warga negara Belanda. Orang-orang berkebangsaan Belanda yang masih tinggal di Indonesia dipulangkan ke negerinya. Disamping pengambialihan perusahaan milik Belanda juga diserukan anti Belanda. Menteri kehakiman pada awal bulan Desember mengumumkan bahwa 50.000 warga negara diusir atau dipulangkan dalam tiga tahap. Kepulangan warga Belanda ke negaranya, memiliki tiga tahapan. Tahap Pertama merupakan gelombang warga negara yang tidak memiliki pekerjaan, tahap kedua merupakan golongan menengah dan tahap ketiga merupakan gelombang untuk mereka yang merupakan tenaga ahli yang sukar dicari penggantinya.

PG Gondang Winangun mulai berganti kepengurusan setelah nasionalisasi. Sebelum terjadi nasionalisasi PG Gondang Winangun dikelola oleh NV Klantensche Cultuur Maats Chapij yang berkedudukan di Amsterdam Belanda. Pengelolanya dilaksanakan oleh N.V Mirandotte Voute dan Co yang berkedudukan di Semarang. yang berkedudukan di Semarang. Setelah terjadinya nasionalisasi PG Gondang Winangun diambialih oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertanian dan berubah menjadi perusahaan milik negara.

Permasalahan demi permasalahan dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara

⁸ *Departemen van Economische Zaken, Volkstelling 1930, Deel II, Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstelanden: Census of 1930 in Netherlands India, Volume II, Native Population in Middle Java and The Native States of Java*, hlm. 21.

muda pada kurun waktu 1945 hingga 1960-an. Berbagai usaha dan kebijakan dilakukan pemerintah Indonesia untuk memapankan kondisi politik dan ekonomi dalam situasi transisi. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tahun 1945 masih banyak mendapat tantangan dari pemerintah kolonial Belanda yang berupaya ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, sehingga Indonesia kembali lagi harus berjuang dalam periode revolusi fisik (1945-1949) mempertahankan kedaulatannya. Intervensi Belanda terus berlanjut walaupun sudah diadakan perjanjian KMB pada tahun 1949.⁹Puncaknya pada tahun 1959 pemerintah Indonesia melaksanakan nasionalisasi terhadap semua perusahaan swasta milik Belanda.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum untuk melegalkan nasionalisasi tersebut. Secara legal formal, proses nasionalisasi didasarkan pada pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Dalam Undang-Undang pasal 1 dijelaskan bahwa: Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.¹⁰Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 86 tahun 1958, pada

tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.¹¹

Wujud keseriusan dari wacana nasionalisasi tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Badan Nasional Perusahaan-Perusahaan Belanda (BANAS) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 1959.¹²Dalam bidang perkebunan, sebelum adanya tindakan nasionalisasi, pemerintah terlebih dahulu telah membentuk badan yang bertugas mengawasi perusahaan perkebunan. Lembaga tersebut disebut dengan Pusat Perkebunan Negara (PPN). Setelah adanya tindakan nasionalisasi, PPN terdiri dari yaitu PPN lama dan PPN baru. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang dinasionalisasi masuk dalam pengawasan PPN Baru. Di bidang industri gula proses nasionalisasi dilakukan oleh pemerintah dimulai pada tahun 1951 dengan membentuk Pusat Penjualan Gula (PPGI) yang beranggotakan orang-orang pribumi. Dibawah naungan PPGI, dibentuk Pedagang Gula Tangan Pertama yang berfungsi sebagai penyalur gula. Kelengkapan organisasi semacam

⁹ Hal Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 1990), hlm. 14

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 86 Tahun 1958, hlm. 1-5.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, hlm.3.

¹²Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir*, (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hlm. 235.

itu membuat PPGI tidak berbeda jauh dengan kartel perdagangan era NIVAS (1930-1942).¹³

Pabrik Gula Gondang Winangun pada awalnya adalah sebuah pabrik yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Bukti yang menunjukkan bahwa PG Gondang Winangun tersebut adalah sebelumnya milik Belanda yaitu tercantum dalam lampiran UU No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Proses nasionalisasi PG Gondang Winangun diawali dari pemogokan buruh. Di bawah komando organisasi buruh SOBSI¹⁴ para buruh industri gula melakukan pemogokan dan menuntut diadakannya nasionalisasi dan peningkatan kesejahteraan buruh.¹⁵ Di PG Gondang Winangun, pemogokan buruh juga terjadi. Pemogokan buruh di PG Gondang Winangun dipelopori oleh SBG yang merupakan salah satu bagian dari SOBSI. Dalam pemogokan tersebut para buruh mengajukan beberapa tuntutan yang kemudian disikapi oleh pihak pabrik. Berbagai tuntutan yang diajukan buruh

sudah didiskusikan dengan pihak pabrik, namun beberapa tuntutan buruh ada yang diterima adapula yang tidak dapat disanggupi oleh pihak PG Gondang Winangun.¹⁶

Sebagai respon dari aksi mogok tersebut rapat Dewan Menteri pada hari Kamis tanggal 5 Desember 1957 memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambilalih oleh buru perusahaan itu selanjutnya akan dikuasai oleh pemerintah dan pimpinannya diserahkan kepada suatu badan pengurus, selain itu dalam bidang itupun juga diputuskan seluruh transfer keuntungan perusahaan-perusahaan Belanda dibekukan dan semua konsulat-konsulat Belanda di Indonesia ditutup, serta memulangkan pegawai-pegawainya.

Landasan hukum nasionalisasi PG Gondang Winangun tercantum dalam Undang-undang No. 86 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959. Selain itu, dasar pengelolaan PG Gondang Winangun setelah nasionalisasi juga dijelaskan dalam SK Mentan no.229/um/57 tanggal 10-12-1957 dijelaskan bahwa akan dibentuk Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru) yang mengelola 13 pabrik gula

1. Pabrik Gula Banjaratma Brebes,
2. Pabrik Gula Jatibarang Brebes,
3. Pabrik Gula Pangka Tegal,
4. Pabrik Gula Sumberharjo Pemalang,
5. Pabrik Gula Seragi dan PSA Comal Pemalangf,

¹³Suroso, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 83.

¹⁴SOBSI merupakan organisasi buruh yang terdiri dari serikat-serikat buruh dari berbagai lapangan industri dan terdiri dari tokoh-tokoh revolusioner yang anti-fasis dan anti-kapitalis.

¹⁵ Lina Farida, "Pabrik Gula Cepiring Kendal Pasca Nasionalisasi Tahun 1957-2008", (*Journal of Indonesian History*, vol. 3 no. 1, 2014), hlm.38.

¹⁶ Laporan Tahunan PG Gondang Winangun tahun 1958, hlm. 2.

6. Pabrik Gula Cepiring Kendal,
7. Pabrik Gula Rendeng Rendeng,
8. Pabrik Gula Kalibagor Banyumas,
9. Pabrik Gula Gondang Baru Klaten,
10. Pabrik Gula Ceper Baru Klaten,
11. Pabrik Gula Mojo Sragen,
12. Pabrik Gula Colomadu Karanganyar
13. Pabrik Gula Tasikamdu Karanganyar¹⁷

Selanjutnya, masalah kepengurusan PG Gondang Winangun diubah kembali pada tahun 1981. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1981 tanggal 1 April telah diadakan pembubaran perusahaan Negara Perkebunan XVI Solo dengan unit usaha terdiri atas pabrik gula Mojo, Tasikmadu, Colomadu, Ceper Baru, Gondang Baru, Kalibagor. Dan penggabungannya ke dalam, PT Perkebunan XV (Persero) Semarang dengan nama PT Perkebunan XV-XVI (Persero) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Solo dengan mengelola unit usaha sebanyak 13 pabrik gula dan 1 pabrik spirtus.

D. Pengaruh Nasionalisasi Terhadap PG Gondang Winangun

Pasca kebijakan nasionalisasi dilaksanakan terjadi perubahan besar di PG Gondang Winangun. Pengaruh nasionalisasi dapat dirasakan terutama dalam bidang manajemen, pelaksanaan produksi, dan kebijakan untuk para tenaga kerjanya. Dalam bidang manajemen, setelah nasionalisasi 1957 Pabrik

Gula Gondang Winangun sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia yang pengelolanya diserahkan kepada PPN baru (Perusahaan Perkebunan Negara Jawa Tengah V) unit Semarang yang dipimpin oleh R. Iman Soempono (1957-1960) dan nama Pabrik Gula Gondang Winangoen. Kemudian pada tahun 1960 nama pabrik gula ini mengalami perubahan, yakni dari Pabrik Gula Gondang Winangun menjadi Pabrik Gula Gondang Baru.¹⁸ Perubahan lain yang terjadi adalah dari yang awalnya dikelola oleh pemerintah kolonial berubah menjadi kaum pribumi lantas juga mempengaruhi struktur kepeguruan PG Gondang Winangun.

Struktur organisasi dan sistem kepemimpinan dalam perusahaan perkebunan setelah nasionalisasi juga berbeda dengan struktur organisasi dan sistem kepemimpinan pada saat masih dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Dalam struktur organisasi pada saat pemerintah Belanda, yang menjabat sebagai administratif adalah para kalangan ningrat, sedangkan struktur organisasi yang masih dibagi menjadi beberapa golongan dan lebih memilih golongan ningrat sebagai pejabat administratif tersebut dihilangkan ketika pabrik telah dinasionalisasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kecemburuan dan kesenjangan sosial yang mencolok.¹⁹

¹⁸ N.N., *Riwayat singkat PT Perkebunan XV-XVI (persero) PG. Gondang Baru*, 1995, hlm. 4.

¹⁹ Lina Farida, *op.cit.*, hlm. 34-41.

¹⁷ SK Mentan no.229/um/57 tahun 1957, hlm. 4.

Struktur manajemen PG Gondang Winangun selain dari golongan ningrat, juga diisi oleh para purnawirawan TNI. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk pengamanan setelah adanya nasionalisasi.

Perbedaan yang terlihat sebelum dan sesudah nasionalisasi ialah tingkat keahlian para pekerja di pabrik gula. Setelah di nasionalisasi, pabrik-pabrik kehilangan tenaga ahli yang mayoritas ialah orang-orang Belanda. Tenaga ahli meninggalkan Indonesia bersama adanya pemulangan warga negara Belanda secara besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 1959 hingga awal tahun 1960-an. Perbedaan cara kerja yang mencolok antara orang-orang Belanda dengan kaum pribumi ialah tingkat kedisiplinan. Para pekerja pribumi awalnya merupakan pekerja-pekerja yang berasal dari tingkat bawah dalam pabrik gula. Setelah nasionalisasi terjadi mereka kemudian ikut menjalankan dan menjadi bagian dari manajemen pabrik.

Kurangnya tenaga ahli pasca nasionalisasi di pabrik gula juga disampaikan oleh pihak manajemen. Kedisiplinan yang dimiliki oleh para pekerja jauh jika dibandingkan dengan kedisiplinan yang diterapkan pada masa kepemimpinan orang-orang Belanda. Karyawan pasca nasionalisasi tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini terus berlangsung pada era selanjutnya, bahkan sampai masa sekarang.

Selain dalam bidang manajemen, pengaruh nasionalisasi juga dapat dirasakan dalam bidang produksi. Perkembangan ekonomi perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih tersebut mengalami penurunan, secara umum dapat dilihat produksi dan ekspor menurun. Hal ini juga dialami oleh Pabrik Gula Gondang Winangun. Produksi gula dan luas lahan tebu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan karena kesukaran-kesukaran yang muncul seperti kurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 02:

Jumlah Produksi PG Gondang Winangun Tahun 1951-1958

Tahun	Jumlah Produksi (kwt)
1951	461
1952	600
1953	498
1954	495
1955	634
1956	698
1957	791
1958	886

Sumber: Laporan Tahunan PG Gondang Winangun Tahun 1951/1952, 1953/1954, 1955/1956, 1957/1958.

Menurunnya produksi gula juga disebabkan oleh : a) Kurangnya pengetahuan dan

pengalaman petani dalam proses produksi tebu, karena sebelumnya hal ini ditangani oleh pabrik gula; b) Komoditi tebu kalah bersaing dalam perolehan penghasilan di bidang komoditi lainnya di lahan sawah; c) Keterlambatan masa tanam sehingga bergeser dari masa tanam optimalnya yang berakibat menurunkan rendemen.²⁰

Selain karena masalah teknis, penurunan jumlah produksi di PG Gondang Winangun juga berhubungan dengan sistem managemennya. Adanya penggantian personil dari kalangan tentara, yang juga terjadi di PG Gondang Winangun. Saat revolusi kemerdekaan pabrik dikuasai oleh TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), dan peranan mereka untuk menjaga kelangsungan pabrik mendapat apresiasi yang tinggi. Saat diberlakukan nasionalisasi, untuk mencegah situasi yang tidak kondusif ini, para tentara kembali dilibatkan untuk mengisi pos-pos tertentu. Hal ini dilakukan supaya dalam proses nasionalisasi tidak ada sabotase dari PKI. Sebenarnya, sejak tahun 1951, para aparat mantan TRIP ini sudah dilibatkan oleh pabrik sebagai pekerja lapangan. Mereka ini dibutuhkan untuk pengkaderan para personil pabrik dan orang staf yang kala itu masih dipegang orang Belanda. Selain untuk keamanan, juga karena ‘penghargaan’ atas perjuangan para aparat,

khususnya saat revolusi fisik, para veteran pejuang kemerdekaan harus didahulukan dalam memperoleh jabatan dalam dinas pemerintah, perusahaan-perusahaan pemerintah, maupun perusahaan partikelir.

Selain produksi luas areal pertanian tebu di Kabupaten Klaten juga mengalami pasang surut, disebabkan karena petani enggan menanam tebu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 03:

Luas Lahan Tanaman Tebu PG Gondang Winangun Tahun 1950-1959

Tahun	Jumlah Produksi (kwt)
1951	461
1952	600
1953	498
1954	495
1955	634
1956	698
1957	791
1958	886

Sumber : Laporan Tahunan PG Gondang Winangun Tahun 1951/1952, 1953/1954, 1955/1956, 1957/1958.

Pabrik gula Gondang Winangun mengali beberapa permasalahan setelah adanya kebijakan nasionalisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyempitan lahan tebu, kurangnya bahan baku, kondisi mesin-mesin yang sudah tua dan juga krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Akibatnya pabrik mengalami kerugian secara

²⁰Muffidatut Diniyah, “Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1957-1997”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNESS., 2011), hlm. 78.

terus menerus dan nyaris ditutup. Kemudian dengan berbagai usaha dan persiapan yang matang serta adanya kerja sama dengan beberapa perusahaan yang bersedia menanamkan modal PG Gondang Winangun dapat bangkit dan diganti namanya menjadi Pabrik Gula Gondang Baru.

Kebijakan nasionalisasi juga telah membawa perubahan besar bagi nasib para buruh PG Gondang Winangun. . Formasi buruh selama tahun 1958 banyak mengalami perubahan sedikit sekali dan pada sekitar tahun 1958 jumlah seluruhnya ada 683 orang terdiri dari 323 orang buruh bulanan dan 360 orang buruh harian. Jumlah buruh kampanye yang dipekerjakan dalam giling tahun 1958 seluruhnya ada 2914 orang dibagi menjadi 1979 orang dalam emplasement dan 1955 orang buruh penebangan dan tanaman. Menurunnya jumlah buruh yang dipekerjakan di PG Gondang Winangun pasca nasionalisasi disebabkan karena kondisi finansial dan produksi PG Gondang Winangun yang masih belum stabil. Oleh karena itu pihak pabrik masih sedikit membutuhkan buruh yang dipekerjakan dalam produksi gula di PG Gondang Winangun.²¹

Perkembangan ekonomi perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih juga mengalami penurunan, secara umum dapat dilihat produksi dan ekspor menurun. Hal ini dialami oleh Pabrik Gula Gondang Winangun. Produksi gula dan luas lahan tebu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan karena kesukaran-keuskaran yang muncul seperti kurangnya tenaga ahli, alat-

alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 04:

Luas Jumlah Produksi PG Gondang Winangun Tahun 1951-1958

Tahun	Jumlah Produksi (kwt)
1951	461
1952	600
1953	498
1954	495
1955	634
1956	698
1957	791
1958	886

Sumber: Laporan Tahunan PG Gondang Winangun Tahun 1951/1952, 1953/1954, 1955/1956, 1957/1958.

Pabrik gula Gondang Winangun menggali beberapa permasalahan setelah adanya kebijakan nasionalisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyempitan lahan tebu, kurangnya bahan baku, kondisi mesin-mesin yang sudah tua dan juga krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Akibatnya pabrik mengalami kerugian secara terus menerus dan nyaris ditutup. Kemudian dengan berbagai usaha dan persiapan yang matang serta adanya kerja sama dengan beberapa perusahaan yang bersedia menanamkan modal PG Gondang Winangun dapat bangkit dan diganti namanya menjadi Pabrik Gula Gondang Baru.

²¹*Ibid.*

Nasionalisasi juga berdampak pada perubahan sistem jam kerja para buruh di PG Gondang Winangun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam giling tahun 1958 ini lamanya bekerja buruh kampanye sampai 185 hari pada masa giling tebu PG Gondang Winangun sendiri 99 hari dalam giling tebu sedangkan PG Madukismo 70 hari. Perubahan lamanya masa giling dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh jumlah tebu yang diproduksi menjadi gula dan jumlah buruh yang dipekerjakan pada masa itu. Dibawah ini sekedar perbandingalamanya giling PG Gondang Winangun pada tahun-tahun sebelumnya:

Tabel 05:

**Masa Giling PG Gondang Winangun Tahun
1955-1958**

Tahun	Masa Giling	Jumlah Hari
1955	13 Juni – 22 Agustus	71 hari
1956	3 Agustus- 27 September	46 hari
1957	5 Juni-30 Juni	25 hari
1958	15 Juni-5 Agustus 18 Agustus -25 Oktober	125 hari

Sumber : Laporan Tahunan PG Gondang Winangun Tahun 1958,hlm.5.

Perubahan lamanya masa giling dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh jumlah tebu yang diproduksi menjadi gula dan jumlah buruh yang dipekerjakan pada masa itu. Pada tahun 1957 misalnya, pada tahun itu adalah masa transisi perubahan manajemen PG Gondang Winangun ketika mengalami nasionalisasi. Karena kondisi sosial politik di Indonesia pada saat itu sangat tidak kondusif karena konfrontasi ekonomi yang dilakukan para buruh industri milik Belanda maka berpengaruh pada jumlah produksi salah satunya di PG Gondang Winangun. Jumlah produksi yang sedikit otomatis mempengaruhi lamanya masa giling. Semakin sedikit bahan baku yang diproduksi maka waktu masa giling juga semakin sebentar.

E. Kesimpulan

Pada tahun 1957 muncul gagasan dan gerakan nasionalisasi di Indonesia. Nasionalisasi merupakan suatu proses untuk pemulihan perekonomian Indonesia. Kondisi seperti itu dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan status perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi hak milik bangsa Indonesia sepenuhnya. Pada awal tahun 1957 sebagai salah satu perusahaan bentukkan Belanda PG Gondang Winangun juga dinasionalisasi kepemilikannya. Salah satu industri yang dinasionalisasi pada masa itu adalah PG Gondang Winangun. Alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya nasionalisasi pada PG Gondang Winangun adalah perekonomian dalam negeri yang berubah, semula pemerintah Indonesia masih menjalankan sistem ekonomi kolonial berubah menjadi

ekonomi nasional. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan nasionalisasi tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengularkan dasar hukum nasionalisasi yaitu UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Dalam proses nasionalisasi PG Gondang Winangun diwarnai oleh beberapa pemogokan buruh. Namun, proses nasionalisasi dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu proses produksi PG Gondang Winangun. Selanjutnya, mengenai proses nasionalisasi PG Gondang Winangun, pabrik ini banyak mengalami perubahan dalam bentuk dan statusnya, tahun 1958 struktur organisasi kepengurusan PG Gondang Winangun sudah dipegang oleh orang-orang pribumi. Perubahan kepengurusan ini kemudian berdampak pada bidang produksi dan tenaga kerja. Selama proses nasionalisasi berlangsung dan beberapa tahun setelah pelaksanaan nasionalisasi produksi PG Gondang Winangun mengalami penurunan. Selain produksi luas areal pertanian tebu di Kabupaten Klaten juga mengalami pasang surut, disebabkan karena petani enggan menanam tebu. Sedangkan bagi para buruh, adanya nasionalisasi telah membuat beberapa peraturan kerja bagi mereka diubah menjadi lebih layak jika dibandingkan peraturan buruh pada masa kolonial. Selain itu, formasi buruh selama tahun 1958 banyak mengalami penurunan. Menurunnya jumlah buruh yang dipekerjakan di PG Gondang Winangun pasca nasionalisasi disebabkan karena kondisi finansial dan produksi PG Gondang Winangun yang masih belum stabil.

B. Daftar Pustaka

Arsip

Jaarverslag Suiker Fabriek Gondang Winangoen 1932, Deel II Kalenderjaar 1932/1933.

Jaarverslag Suiker Fabriek Gondang Winangoen, Deel II, 1934/1935.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 86 Tahun 1958.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959.

Laporan Tahunan PG Gondang Winangun Tahun 1951/1952, 1953/1954, 1955/1956, 1957/1958.

SK Mentan no.229/um/57 tahun 1957

Buku-buku

Allen, G.C. dan A.G. Donnithorne. 1957. *Western Enterprises in Indonesia and Malaya*. London: George Allen & Unwin.

Bisuk Siahaan. 1996. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir*. Jakarta: Pustaka Data.

Bondan Kanumoyoso. 2011. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan.

N.N. 1995. *Riwayat singkat PT Perkebunan XV-
XVI (persero) PG. Gondang Baru.*

*terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat Kendal Tahun 1957-1997,
Skripsi, Semarang: Universitas Negeri
Semarang, 2011.*

Skripsi

Mufiddatut Diniyah, "*Sejarah Perkembangan
Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya*

Yogyakarta, 20 Oktober 2018.

Pembimbing,

Dina Dwi Kurniarini, M.Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001

Mengetahui,
Reviewer,

Mudji Hartono, M.Hum.
NIP. 19550115 1984031 001

